
PEMAHAMAN DAN KESIAPAN UKM DALAM IMPLEMENTASI SAK ETAP : SURVEY PADA UKM DI BEKASI

Oleh

**Ari Dewi Cahyati
Kurniawati Mulyanti
Rianti Setyawasih**

Dosen Ekonomi UNISMA Bekasi

Abstract

Objective of this study was to determine whether SMEs in Bekasi has made the financial statement for a basis tax reporting, basis for decision making in business management, credit application to financial institutions as well as to determine whether SMEs have been aware of any enforcement that ETAP GAAP has become effectively January 1, 2010. The other objective is to determine whether the user ETAP GAAP in this case SMEs in Bekasi have understood and prepare for implementation of ETAP GAAP

The research method used is descriptive qualitative. The result show that most of SME in Bekasi has made the financial statements and tax reporting as a basis basis tax reporting, basis for decision making in business management, credit application to financial institutions (60%). However most of SMEs (65%) did not know that ETAP has apply as GAAP effective January 1, 2010

Most of SMEs in Bekasi merely know enough about the accounting treatment under GAAP ETAP with score 1.8. However, SMEs in Bekasi ready and willing to implelment ETAP GAAP with score 3

Key words: *Comprehention, readiness, impelementation of ETAP GAAP.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang makin kompetitif, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Salah satu faktor yang menjadi kendala untuk berkembangnya UKM adalah ketidakmampuan UKM untuk akses ke Lembaga – lembaga keuangan. Salah satu penyebab terkendalanya UKM untuk akses ke lembaga – lembaga keuangan adalah adanya persyaratan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia bagi UKM yang ingin mendapatkan kredit pada lembaga keuangan tersebut. Bahkan Bank Rakyat Indonesia mewajibkan debiturnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan ETAP

Sementara itu standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia terus mengalami perubahan perbaikan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan penyesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di negara lain. Konvergensi ke IFRS (*International Financial Reporting Standard*) membawa beberapa konsekuensi dalam standar akuntansi, yaitu SAK berbasis IFRS, SAK ETAP, SAK Syariah.

Pengguna dari SAK ETAP ini pada umumnya adalah UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan koperasi yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Seringkali SAK ETAP ini menjadi persyaratan penting bagi UMKM yang akan mengajukan kredit kepada lembaga perbankan. Karena bagi lembaga perkreditan dengan melihat SAK ETAP dari sebuah entitas yang akan mengajukan kredit akan terlihat bagaimana tingkat kemampuan UMKM tersebut untuk mengembalikan kredit yang akan diberikan. Oleh karena itu setiap UMKM perlu mengetahui, memahami serta menyiapkan diri untuk menggunakan SAK ETAP demi kemajuan usahanya. Salah satu tujuan diterbitkannya SAK ETAP adalah agar usaha kecil menengah dapat menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah UKM yang ada di Kota Bekasi sudah membuat laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak dan pembuatan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, serta pengajuan kredit ke lembaga keuangan
2. Untuk mengetahui apakah pengguna SAK ETAP dalam hal ini UKM yang ada di daerah Bekasi telah mengetahui adanya pemberlakuan SAK ETAP yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2011
3. Untuk mengetahui apakah pengguna SAK ETAP dalam hal ini UKM yang ada di daerah Bekasi telah memahami perlakuan akuntansi untuk Entitas yang menggunakan SAK ETAP
4. Untuk mengetahui apakah pengguna SAK ETAP dalam hal ini UKM yang ada di daerah Bekasi siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan

KAJIAN PUSTAKA

2.2. Definisi UKM

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

2.2.2. Pengertian Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2.3. Peranan UKM dalam Perekonomian

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Peran UKM dalam perekonomian misalnya dapat mengurangi pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap, memberdayakan perekonomian rakyat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Brutto serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sektor UKM juga telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia, karena sektor UKM terbukti tangguh hal ini terbukti ketika krisis Ekonomi 1998, sektor UKM dapat bertahan sementara banyak industri besar yang tumbang.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menekop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro yaitu usaha dengan jumlah total penjualan setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar, pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 per sen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2000), pada tahun 1999 usaha-usaha kecil (termasuk usaha rumah tangga) memperkerjakan 88,7 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia., sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak 10,7 persen. Ini berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Disamping ini nilai tambah bruto total yang dihasilkan usaha-usaha kecil secara keseluruhan meliputi 41,9 per sen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 1999, sedangkan usaha-usaha menengah secara keseluruhan menghasilkan 17,5 persen dari POB (lihat juga Thee Kian Wie, 2001). Dengan demikian, nilai tambah bruto total yang dihasilkan UKM secara keseluruhan hampir sebesar 60 persen

Tabel 2.1.
Jumlah Tenaga Kerja dan Kontribusi UKM pada PDB, 1999

	Usaha Kecil (termasuk mikro)	Usaha Menengah	Usaha Kecil Dan Menengah	Usaha Besar	Total
Jumlah Usaha	36.761.689 (99.85%)	51.889 (0.14%)	36.813.588 (99.99%)	1831 (0.01%)	36.816.409 (100.0%)

Sumber: Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA., APU. Ahli Peneliti Utama bidang Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

2.4 Upaya Perlindungan Pemerintah Kepada UKM

Strategi pembinaan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan UKM sebagaimana dikemukakan oleh Dumairy (1996) adalah sebagai berikut:

1. aspek manajerial yang meliputi peningkatan produktivitas, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan SDM
2. aspek permodalan yang meliputi: bantuan modal dari BUMN dan Pengusaha besar dan penyaluran kredit
3. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem bapak –anak angkat, PIR, keterkaitan hulu hilir keterkaitan hilir-hulu, modal ventura atau subkontrak
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK, LIK atau SUIK
5. pembinaan untuk daerah tertentu melalui KUB(kelompok usaha Bersama) atau KOPINKRA(koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

2.6 Standard Setting Theory

Penyusunan standar dipandang sebagai mediator antara kepentingan yang berlawanan antara pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal dan pihak manajemen. Perkembangan perekonomian dan bisnis menuntut standar akuntansi yang diterima di semua pengguna standar. Munculnya standar akuntansi keuangan didorong oleh tekanan pasar mengenai kebutuhan informasi yang memadai. Permasalahan informasi asimetri yang memunculkan permasalahan *moral hazard* dan *adverse selection* mengharuskan pembuatan informasi memerlukan aturan khusus sehingga pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang akurat.

2.7 Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

2.7.1 Standar Akuntansi Berbasis IFRS

Standar Akuntansi Internasional mutlak dibutuhkan di era globalisasi. Hal inilah yang mendorong Indonesia sebagai Negara anggota G20 memutuskan untuk konvergensi ke standar Akuntansi Internasional. IFRS (*International Financial Reporting Standar*) dirumuskan oleh IASB yang bermarkas di London. Era globalisasi yang ditandai dengan banyak munculnya perusahaan multinasional mensyaratkan perusahaan multinasional memahami praktik akuntansi ditempat perusahaan tersebut berkedudukan. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan hampir tanpa batas negara, sumber daya produksi (misal uang) yang dimiliki oleh seorang investor di satu negara tertentu dapat dipindahkan dengan mudah dan cepat ke negara misalnya melalui mekanisme bursa saham. Hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di negara lain. Pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor serta calon investor dan calon kreditor akan menemui banyak kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan dengan standar yang berbeda-beda. Hal tersebut diatas yang mendorong timbulnya standar akuntansi internasional (IFRS).

2.7.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi berbasis IFRS yang salah satu karakteristiknya adalah penggunaan nilai wajar terlampaui canggih untuk digunakan UMKM. Padahal UMKM merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia, mengingat usaha mikro, kecil, menengah adalah padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Populasi UMKM yang sangat banyak dan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (data 2008 mencapai 99,98 % dari unit usaha yang ada) kiranya patut diperhatikan lebih saksama karena kiprah UMKM lebih banyak di sektor riil yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disamping itu UMKM terbukti tangguh hal ini terbukti ketika krisis Ekonomi 1997, sector UKM dapat bertahan sementara banyak industry besar yang tumbang. Ketika terjadi krisis keuangan tahun 1997, 95% UMKM selamat dari resesi dan 31% secara luwes bisa melakukan restrukturisasi usaha dengan baik bahkan 65% keluar dari masa krisis dengan kondisi yang lebih sehat (Husada, 2010) Sumbangan UMKM terhadap GDP juga menunjukkan trend naik. Pada tahun 2000 UMKM menyumbang sebesar 54,5% dari total GDP nasional dan di tahun 2003 UMKM menyumbang sebesar 56,7% dari total GDP yaitu 41,1% dari usaha kecil dan 15,6% dari perusahaan menengah (Hoesada, 2010). Tidak perlu diragukan lagi bahwa UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu UMKM perlu untuk dikembangkan. Dengan adanya SAK ETAP maka diharapkan UMKM lebih berkembang, misalnya UMKM dapat menyeleggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya. Mengingat informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal untuk memperoleh kredit dari bank, tujuan pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan seperti pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan dengan adanya SAK ETAP akan meningkatkan profesionalitas dari UMKM. Dengan adanya SAK ETAP, maka perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Menurut (Hoesada, 2010) Standar Akuntansi ETAP diperlukan NKRI karena beberapa alasan yaitu :

1. Memberi kebebasan berbisnis, kebebasan berinvestasi, kebebasan keuangan dan kebebasan . lapangan kerja
2. Mendorong reformasi keuangan global, membangun system kapitalisme berbasis UKM dan non pasar modal
3. Mendorong revitalisasi industry manufaktur
4. Mendorong revitalisasi industry perbankan berbasis kelayakan usaha dan laporan keuangan
5. Mengatasi kemiskinan
6. Mendukung Bank pertanian, Bank UMKM (KADIN) dan paket UMKM versi krisis
7. Memberi dukungan ekonomi syariah dan standar akuntansi syariah.

2.7.3 Standar Akuntansi Syariah

Indonesis sebagai Negara muslim terbesar di dunia telah mengalami perkembangan pesat dalam transaksi syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa motor penggerak dari transaksi syariah adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dari periode ke periode. Perkembangan perbankan syariah disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia

Kantor	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum Syariah	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	8	15	19	20	26
BPRS	84	88	92	105	111
Jumlah	337	443	550	636	1024

Sumber: Bank Indonesia

Timbulnya bank syariah antara lain dilatar belakangi oleh Penghindaran bisnis yang tidak sesuai syariah, penghindaran dari system riba dan Gharar (ketidakpastian) dan menjadikan uang sebagai komoditas dan menggerakkan sector riil. Tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi Bank syarih telah dapat menggerakkan sector riil (misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*).

NKRI sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia namun lepasan kredit syariah dewasa ini lebih kecil dari kredit konvensional yang berbasis bunga. Metode pembiayaan syariah secara konseptual lebih aman dan cepat dari UKM karena : 1) Jumlah pengusaha UKM beragama islam dominan 2) Sebagian pengusaha UKM tidak mempunyai jaminan kredit 3) Para debitur UKM adalah debitur yang bisa dikatakan tulus dan jujur –Keamanan pengembalian kredit lebih tinggi karena dikaitkan dengan kehidupan spiritual peminjam (Hoesada, 2010). Jadi dengan adanya perbankan syariah diharapkan pemberian kredit terhadap sector UKM lebih besar sehingga UKM bisa lebih berkembang, mengingat modal merupakan salah satu hambatan berkembangnya UKM.

Pada awal tahun berdirinya hingga tahun 2002 Bank syariah tidak mempunyai PSAK khusus yang melaporkan transaksinya. Setelah Standar Akuntansi syariah diterbitkan maka entitas-entitas yang melakukan transaksi syariah, harus melaporkan transaksi syariah tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Penggunaan Standar Akuntansi Syariah diantaranya Bank Umum Syariah, BPR-Syariah, kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesiapan dan Pemahaman UKM atas Implementasi SAK ETAP” ini didesain berdasarkan paradigma penelitian kualitatif.

3.2 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif – kuantitatif.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi semua UKM yang ada di Kota Bekasi. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 20 UKM yang ada di Bekasi. Pengambilan sample dilakukan dengan metode judgement sampling. Kriteria UKM menggunakan UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha kecil dan menengah

3.4 Deskripsi Operasional Variabel

1. Pemahaman SAK ETAP : Sejauh mana persepsi UKM memahami isi penyajian pos-pos dalam laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP
2. Kesiapan Implementasi SAK ETAP : Merupakan sikap kemauan UKM dalam implementasi SAK ETAP

3.6 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini digunakan 4 kuesioner. Instrumen pertama berupa kuesioner yang akan disebarkan ke pihak UKM untuk mengetahui apakah UKM sudah membuat laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan untuk pembuatan laporan bisnis internal, pembayaran pajak dan pengajuan kredit ke bank, serta pengetahuan UKM akan pemberlakuan SAK ETAP yang berlaku efektif per 31 Desember 2011, Kuesioner kedua untuk mengetahui pemahaman akan SAK ETAP dan instrument Ketiga terkait kuesioner tentang kesiapan akan implementasi SAK ETAP. Sedangkan instrumen terakhir adalah berupa pertanyaan terbuka mengenai kendala apa saja yang dihadapi UKM dalam Implementasi SAK ETAP.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan analisis pemahaman-kesiapan (Martilla dalam supranto: 2001)

Analisis ini akan diawali dengan menghitung skor rata-rata tingkat pemahaman dan kesiapan sebagai berikut:

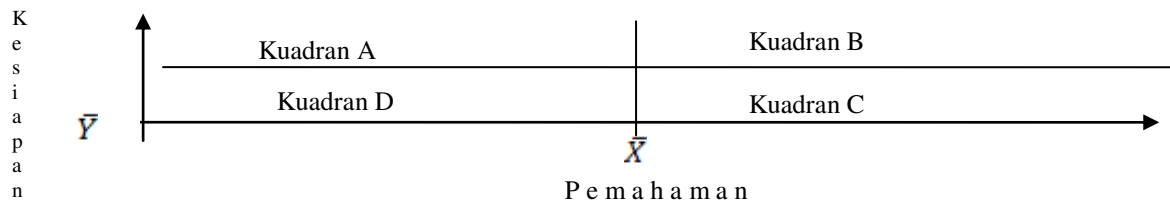
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad \text{dan} \quad \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$

Dimana X = skor rata-rata tingkat pemahaman responden terhadap SAK ETAP, Y = skor rata-rata tingkat kesiapan responden terhadap SAK ETAP, n = jumlah responden. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata dari rata-rata tingkat pemahaman dan rata-rata dari rata-rata tingkat kesiapan sebagai berikut:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{X}_i}{k} \quad \text{dan} \quad \bar{\bar{Y}} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{Y}_i}{k}$$

Dimana : average X = rata-rata dari rata – rata skor tingkat pemahaman, average Y = rata-rata dari rata-rata skor kesiapan, k = jumlah atribut yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan tingkat kesiapan responden.

Selanjutnya nilai rata-rata diatas diplotkan ke dalam diagram pemahaman- kesiapan untuk mengetahui posisi UKM (koordinat tingkat pemahaman di sumbu X dan kesiapan UKM pada sumbu Y), sebagai berikut:



Keterangan:

1. Kuadran A, menunjukkan bahwa UKM pada kondisi tingkat pemahaman yang rendah tetapi tingkat kesiapan implementasi SAK ETAP tinggi.
2. Kuadran B, menunjukkan bahwa UKM pada kondisi tingkat pemahaman yang tinggi dan tingkat kesiapan implementasi SAK ETAP tinggi.
3. Kuadran C, menunjukkan bahwa UKM pada kondisi tingkat pemahaman yang tinggi dan tingkat kesiapan implementasi SAK ETAP rendah.
4. Kuadran D, menunjukkan bahwa UKM pada kondisi tingkat pemahaman yang rendah dan tingkat kesiapan implementasi SAK ETAP rendah.

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden 12 responden (60%) menyatakan telah membuat laporan keuangan dan 8 (40%) responden menyatakan tidak membuat laporan keuangan. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini kategori aset 50 juta s.d 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penjualan >300 juta s.d 2,5 Milyar terdiri 14 perusahaan dan aset 500 juta s.d 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penjualan 2,5 Milyar s.d 50 Milyar terdiri atas 6 perusahaan.

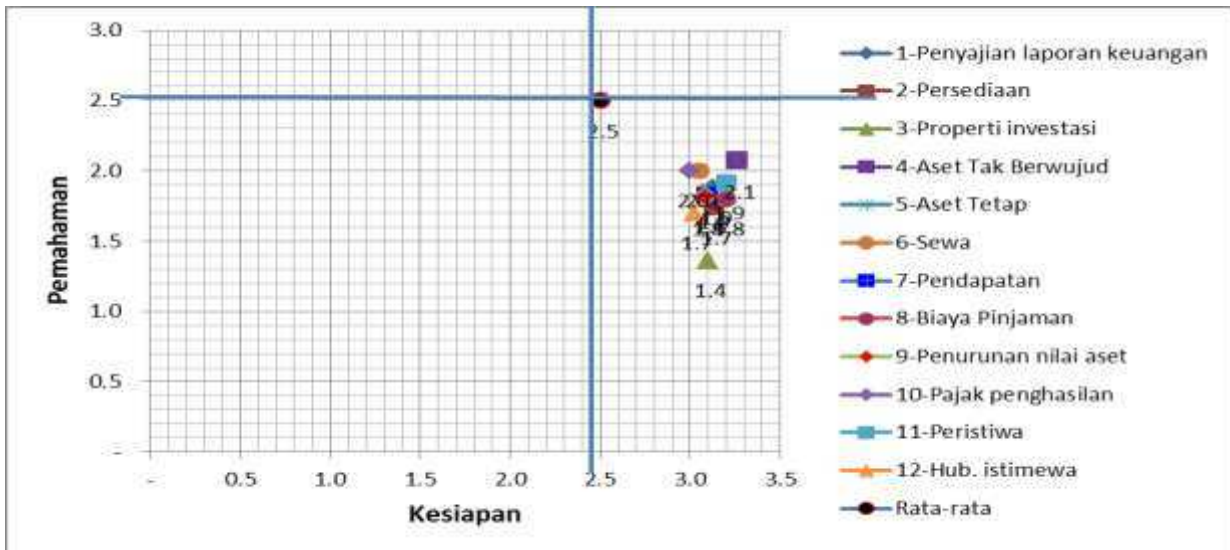
4.2 Mengenai penyusunan laporan keuangan, Penggunaan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis internal, pengajuan kredit ke bank, dasar pembayaran pajak, pengetahuan pemberlakuan SAK ETAP

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 60% responden membuat laporan keuangan dan 40% responden tidak membuat laporan keuangan. 65% responden menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa SAK ETAP berlaku efektif per tanggal 1 januari 2011. 40% responden menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan 60% menyatakan laporan keuangan tidak dibuat sesuai standar akuntansi keuangan. 30% responden menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat tidak digunakan sebagai dasar pengambilan bisnis internal dan 70% menyatakan laporan keuangan dipakai dalam pengambilan keputusan bisnis internal. 60% responden yang membuat laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan dijadikan dasar pengajuan kredit ke bank. 55% responden menyatakan laporan keuangan dijadikan dasar pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil survey, diketahui bahwa hambatan dalam penyusunan laporan keuangan berkaitan dengan terbatasnya kemampuan Sumber daya manusia. Sedangkan hambatan dalam implementasi SAK ETAP adalah kurangnya sosialisasi penggunaan SAK ETAP.

4.3 Pemahaman Isi SAK ETAP

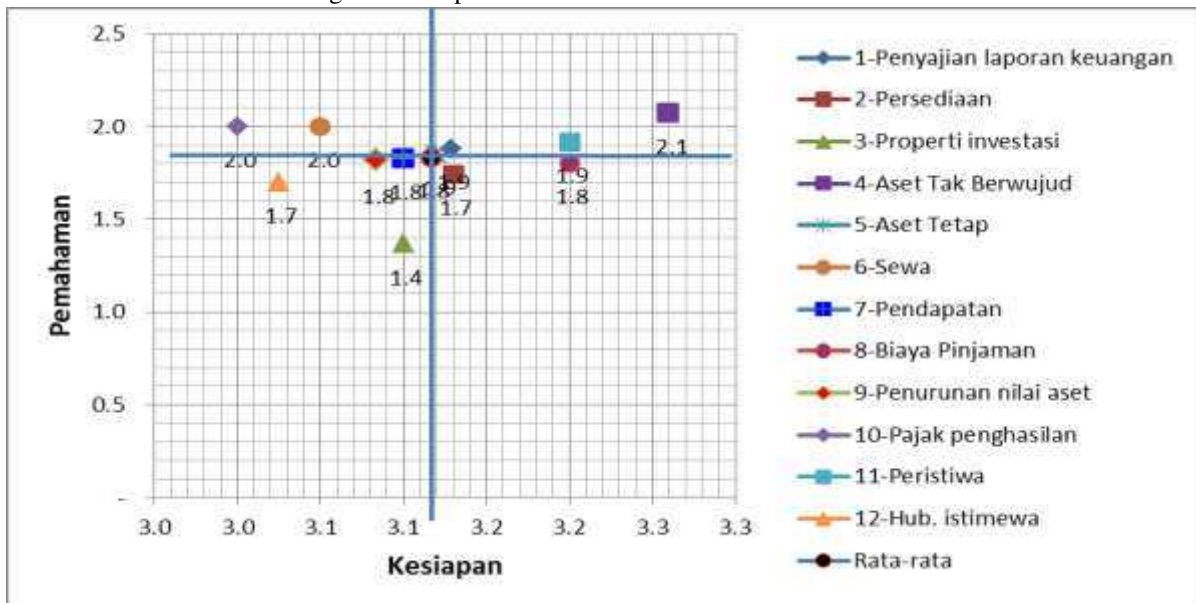
a. Pembahasan Secara Absolut



Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar Item pertanyaan tentang pemahaman dalam kuesioner berada di kuadran dimana tingkat pemahaman terhadap SAK ETAP rendah dan Tingkat Kesiapan Implementasi SAK ETAP rendah. Oleh Karena itu regulator perlu membuat format pelatihan yang difokuskan pada upaya pemahaman isi SAK ETAP

b. Pembahasan Secara Relatif

Pembahasan secara relative digambarkan pada matrik dibawah ini:



Pemahaman masing-masing item pemahaman dan kesiapan akan dijelaskan sebagai berikut:

Hasil survey UKM menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akan penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi dan kesalahan akuntansi menunjukkan skor rata-rata adalah sebesar 1,9 yang

menunjukkan bahwa pemahaman akan penyajian laporan keuangan mendekati cukup paham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman UKM atas persediaan dan Aset berwujud menunjukkan skor rata-rata 2 yang berarti UKM cukup paham atas penyajian persediaan dan aset tetap didalam laporan keuangan. Pemahaman UKM atas property investasi menunjukkan Skor 1 yang berarti UKM tidak memahami akan penyajian property investasi. Pemahaman akan penyajian aset tidak berwujud dalam laporan keuangan menunjukkan skor rata-rata sebesar 1,9 yang berarti UKM mendekati cukup paham. Pemahaman UKM atas penyajian sewa dalam laporan keuangan adalah cukup paham (skor 2). Sedangkan Pendapatan menunjukkan skor 1,8 yang berarti UKM mendekati cukup paham atas pernyataan Standar akuntansi Pendapatan. Biaya pinjaman menunjukkan skor 1,8 yang berarti UKM mendekati cukup paham atas pernyataan Standar akuntansi biaya pinjaman. Penurunan nilai aset 1,8 yang berarti UKM mendekati cukup paham atas pernyataan Standar akuntansi mengenai penurunan nilai aset. Pajak penghasilan dengan skor 2 yang berarti UKM cukup paham atas pernyataan Standar akuntansi. Peristiwa setelah tanggal neraca dengan skor 1,9 yang berarti UKM mendekati cukup paham terhadap pernyataan Standar akuntansi atas peristiwa setelah tanggal neraca. Pengungkapan hubungan istimewa menunjukkan skor 1,7 yang berarti UKM tidak paham atas pernyataan Standar akuntansi mengenai pengungkapan hubungan istimewa.

4.4 KESIAPAN ATAS IMPLEMENTASI SAK ETAP

Hasil penelitian mengenai kesiapan UKM atas implementasi SAK ETAP menunjukkan UKM siap atas implementasi SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan skor antara 3 sampai dengan 3,2. Kesiapan UKM atas implementasi SAK ETAP kontradiktif dengan pemahaman UKM atas isi SAK ETAP yang hanya menunjukkan skor 1,8 yang berarti hanya mendekati cukup paham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pemahaman UKM atas SAK ETAP rendah tetapi UKM siap dan mau mengimplementasikan SAK ETAP.

SIMPULAN, KELEMAHAN, REKOMENDASI

5.1 Simpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar UKM di wilayah Bekasi sudah membuat laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak dan pembuatan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha serta pengajuan kredit ke lembaga keuangan (60%).
2. Sebagian besar UKM di wilayah Bekasi (65%) belum mengetahui pemberlakuan SAK ETAP yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2011. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang SK ETAP
3. Sebagian besar UKM yang ada di daerah Bekasi hanya sebatas mendekati cukup paham perlakuan akuntansi untuk Entitas yang menggunakan SAK ETAP dengan skor rata – rata sebesar 1,8 UKM berkaitan dengan rencana implementasi SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan, UKM di wilayah Bekasi siap dan mau melaksanakan implementasi SAK tersebut, terbukti dengan rata-rata skor jawab responden sebesar 3.

5.2 Kelemahan Penelitian

1. Sampel penelitian hanya berjumlah 20 UKM sehingga kurang mewakili dari populasi UKM yang ada di Bekasi
2. Dalam analisis penelitian ini tidak dibedakan antara unit usaha kecil dan menengah, sehingga kebijakan yang direkomendasikan tidak dipisahkan antara Usaha Kecil dengan usaha menengah.

5.3 Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Hendaknya penelitian sebelumnya memperluas penelitian sehingga hasil penelitian bisa mewakili UKM yang ada di Bekasi.
- b. Hendaknya dibedakan unit usaha kecil dan menengah sehingga bisa diketahui hasil penelitian mengenai pemahaman dan kesiapan atas implementasi SAK ETAP pada usaha kecil dan menengah.

2. Rekomendasi bagi UKM, Hendaknya UKM mempersiapkan SDM untuk menerima sosialisasi dan implementasi SAK ETAP

3. Rekomendasi bagi DSAK, Membuat program usulan untuk sosialisasi dan pendampingan UKM dalam persiapan implementasi SAK ETAP.

4. Rekomendasi bagi Perguruan Tinggi:

- a. Melakukan program pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan SAK ETAP
- b. Menerbitkan panduan sosialisasi dan implementasi SAK ETAP bagi UKM di wilayah Bekasi

5. Rekomendasi bagi Pemerintah, Menganangkan program sosialisasi dan pemberlakuan SAK ETAP bagi UKM

REFERENSI

- Cahyati, Ari Dewi 2010. Peluang manajemen Laba Pasca Konvergensi IFRS: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi* Vol. 2 No.1. Januari 2011. hal.58-66.
- Cahyati, Ari Dewi 2010. Tiga Pilar Standar Akuntansi Keuangan untuk Memperkokoh Perekonomian Bangsa. Belum dipublikasikan.
- Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Erlangga Jakarta.
- IAI.2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
- J. Supranto. 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Rineka Cipta, Jakarta.
- UUNo. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.
- Partomo, 2004. Usaha kecil Menengah dan Koperasi. Working Papers Series Universitas Trisakti.
- Hoesada, Yan 2010 . Standar ETAP sebagai Strategi Kemudahan untuk Membangun Ekonomi Berbasis UKM” Dipresentasikan dalam Semiloka Penerapan SAK ETAP Untuk Pengembangan UKM. Universitas Mercu Buana tanggal 15 Juli 2010.